

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia salah satunya dapat dilakukan dengan cara berwirausaha, sehingga masyarakat bisa mandiri tanpa harus bergantung kepada orang lain serta dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri seorang wirausahawan. Kegiatan berwirausaha itu banyak macamnya, seperti usaha kecil di bidang kuliner, jasa, jual beli maupun di bidang agrobisnis.

Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia dan termasuk salah satu penggerak perekonomian bangsa. Adanya UKM tersebut harus didorong dan didukung kemampuannya agar tetap berkembang karena UKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian dan perluasan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, kerja sama antara pelaku UKM dan pemerintah maupun masyarakat akan menambah keuntungan berbagai pihak. Dalam menjalankan usahanya, tidak sedikit pengelola UKM mendapat kesulitan atau kendala dalam hal pencatatan kegiatan operasionalnya. Kesulitan ini menyangkut aktivitas dan penilaian atas hasil yang telah dicapai oleh setiap usahanya. Pencatatan yang dilakukan saat ini hanya dengan menghitung selisih antara uang masuk dan uang keluar, tanpa melihat pengeluaran uang itu untuk atau dari alokasi kegiatan usaha atau non usaha. Kebanyakan pelaku atau pengelola usaha kecil dan menengah (UKM) hanya

menghitung harta yang dimiliki sebatas uang kas yang dipegang saja.

Sering kali dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM), hasil usaha dikatakan bagus apabila pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan yang sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan saja, melainkan juga diperlukan pengukuran dan pengelompokan atas transaksi atau kegiatan usaha yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Setiap kegiatan usaha diharapkan memiliki laporan keuangan karena laporan keuangan berfungsi untuk menganalisis kinerja keuangan seperti memberi informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan. Hal itu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai tolak ukur bagi pemilik usaha dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga untuk mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap dan bukan hanya didasarkan pada laba saja.

Penyusunan laporan keuangan UKM harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu standar yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tanggal 17 Juli 2009 tentang Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Tujuan

diterbitkan SAK ETAP adalah untuk menerapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik seperti UKM, karena pada umumnya UKM belum memiliki akuntabilitas publik yang signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Namun pada kenyataannya, praktek akuntansi keuangan pada usaha kecil dan menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu diantaranya disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari pemilik. Padahal dalam menerapkan penyusunan laporan keuangan terdiri dari berbagai macam prosedur yang mengatur tentang langkah-langkah yang harus dilaksanakan agar suatu perusahaan dapat berjalan efisien dan efektif. Semakin kompleks suatu kegiatan operasional perusahaan maka penyusunan laporan keuangan semakin penting untuk diterapkan. Semakin berkembangnya suatu usaha, maka menuntut suatu usaha kecil dan menengah (UKM) untuk menjalin hubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM), maka pemilik usaha akan berhubungan dengan pihak bank atau lembaga keuangan lainnya. Pihak bank atau lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari usaha kecil dan menengah (UKM).

Di Indonesia juga telah ditetapkan sebuah peraturan yang mewajibkan usaha kecil (UKM) untuk melakukan pencatatan akuntansi yang baik yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 48 menyatakan pembinaan dan pengawasan

terhadap usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang telah memperoleh izin usaha dilakukan oleh pejabat secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, pada pasal 49 ditegaskan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, pemegang izin usaha wajib menyusun pembukuan kegiatan usaha.

UKM Kecap Sempurna merupakan salah satu UKM yang ada di Kabupaten Blitar yang bergerak dalam bidang produksi kecap. UKM ini termasuk usaha yang memiliki daya saing tinggi dilihat dari jumlah produksi dan penjualannya. Namun UKM ini belum sepenuhnya menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP. Padahal laporan keuangan UKM yang sudah sesuai SAK ETAP dapat dijadikan alat bantu pemilik dalam menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan yang tepat dalam kelangsungan usahanya. Pengambilan keputusan pemilik UKM tersebut salah satunya berupa keputusan peminjaman modal atau dana kepada pihak bank. Pengambilan keputusan ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas bisnis atau usaha yang sudah dijalankan pemilik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan UKM Kecap Sempurna.”**

B. Permasalahan

UKM Kecap Sempurna sudah lama menjalankan kegiatan operasionalnya, akan tetapi belum melakukan atau membuat laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Saat ini di UKM ini hanya membuat laporan kecil seperti pencatatan uang masuk dan keluar serta pencatatan kecil lainnya. Pemilik UKM perlu membuat catatan pembukuan atau laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar akuntansi. Hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan yang telah dibuat oleh pemilik UKM yaitu peminjaman modal atau dana untuk mengembangkan dan memperluas bisnis usahanya. Untuk itu diperlukan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yaitu laporan keuangan sesuai SAK ETAP guna memenuhi salah satu syarat peminjaman modal tersebut.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis, diharap penulis dapat lebih memahami tentang permasalahan yang ada serta pengaplikasiannya dalam perusahaan lainnya.

2. Bagi pemilik UKM, diharapkan dapat membantu dalam mengelola dan membuat laporan keuangan yang berguna untuk memperoleh informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.
3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang laporan keuangan yang benar.